



*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

**DI SUBOSUKAWONOSRATEN**

Dra. Siti Nurlaela, SE., M.Si., Ak.

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Bidang Kajian : Sektor Publik/ Sistem Informasi Akuntansi

Metode Kuantitatif

Email : [dra\\_nurlaela@yahoo.com](mailto:dra_nurlaela@yahoo.com)

**ABSTRACT**

This study tests the influence of the organization behavior factors to the use of Local government Financial Accounting System. This study aims to test the direct influence of factors such as organizational support Superiors, Clarity of purpose, and Training in improving usability Regional Financial Accounting System. Furthermore, It tests in directly influence of factors such as organizational support superiors, Goal Clarity and Training through cognitive conflict and affective conflict intervening variables.

This study uses primary data from the respondents' answers to questions related to the behavior of the usability factors Financial Accounting System in the SUBOSUKAWONOSRATEN Region. The Analysis is based on data from 407 respondents through the questionnaire research.

Based on the results of data analysis and testing hypothetical, the conclusion can be drawn from that organizational factors tested, only support for the superior effect of improving the Financial Accounting System Use Area.

**Keywords:** Support superior, Goal Clarity, Training, Cognitive conflict, and Conflict, Financial Accounting System Use Area.

**I. PENDAHULUAN**



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

### **1.1. Latar Belakang**

Latar belakang penelitian ini adalah atas peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Chenhall (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa factor-faktor perilaku selama implementasi akan meningkatkan kegunaan sistem ABCM pada perusahaan. Konflik Afektif berhubungan negative dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung dari penelitian Chenhall (2004) dimana factor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan sistem ABCM. Hubungan tidak langsung antara faktor organisasional dengan sistem yang dimediasi dengan konflik kognitif ada perbedaan yang sangat kecil. Dan saran untuk peneliti lanjutan dengan lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas dan kantor dan Badan Pengelola Keuangan Daerah saja. Penelitian tersebut Saran penelitian tersebut diperluas untuk seluruh Dinas di Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Pengembangan instrumen yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan Struktur organisasi baru yang sesuai PP No.58 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006.



*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

Penelitian yang dilakukan Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi, komitmen, SDM bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri No. 13 tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Abdul Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemda di Jawa Tengah.

Penelitian ini menguji Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, konflik kognitif dan afektif dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN



*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

(Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten).

Penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan-perbedaan tersebut adalah populasi penelitian ini tidak hanya pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian keuangan kantor sekretaris daerah dan badan pengelola keuangan daerah saja akan tetapi populasinya adalah pengelola keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Penatausahaan Dinas masing-masing Kota dan Kabupaten di SUBOSUKAWONOSRATEN, Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/079/BAKD Tanggal 12 Februari 2008 hal Pedomanan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan memberikan gambaran mengenai operasionalisasi penerapannya dalam proses pencatatan akuntansi baik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun satuan kerja pengguna Anggaran (SKPD).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan riset berikut :

1. Apakah Faktor Organisasi seperti Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan akan berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?



*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

2. Apakah Faktor organisasi seperti dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan dengan variabel intervening dapat meningkatkan konflik kognitif, menurunkan konflik Afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah , maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut: Menguji pengaruh langsung faktor organisasional seperti (Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan) dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Menguji pengaruh tidak langsung faktor organisasi seperti (Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan) melalui variabel intervening akan dapat meningkatkan konflik kognitif, menurunkan konflik afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak Akademisi dapat memberika kontribusi dalam menambah literatur mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, bagi Praktisi,

sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

## **2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **Faktor Keperilakuan Organisasi**

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004): Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Boston et al (1996) mengidentifikasi *Public Choice theory*, teori agensi dan *transactional cost economics* sebagai paradigma yang dominan ketika siap untuk mereformasi pemerintah: *Public Choice theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi. Public Choice diaplikasikan sebagai usaha untuk peran pemerintah, meningkatkan transparansi dll., *Teori Agensi* dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
www.sna13purwokerto.com

---

mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi, *Transactional Cost Economic* berfokus pada struktur pemerintah yang optimal. Menurut Yin (1994) melakukan penelitian dengan *multiple-case design* dengan sub unit yang menjadi peran penting. Fokus pada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam organisasi secara umum dan Pettigrow (1992) melakukan penelitian yang lebih spesifik yang menyadari pentingnya kelas eksekutif inti yang mengontrol pengendalian dan alokasi sumber daya. Dezin (1978) meneliti gambaran dari unsure pokok organisasi yang terpisah (manajemen dan anggota yang dipilih) dengan menggunakan data, laporan informasi keuangan dalam local Authorities. Dengan menggunakan wawancara semi directed. Yang diinterview adalah CEO, direktur keuangan, direktur strategi dan orang-orang yang memegang peran pokok (pendidikan, pelayanan social, ekonomi). *Contingency Theory*, dipelopori oleh Burn dan Stalker (Otley, 1980), dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang task environment, Dalam penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan praktek manajemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa Organisasi yang mekanistik (dengan ciri-ciri pembagian tugas yang spesifik dan tegas) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang dinamis (dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan yang tidak stabil. Otley (1980), menyatakan Teori kontijensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada





Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

faktor-faktor situasional dalam organisasi. Kesesuaian (*fit*) yang lebih lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontijensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. Berdasarkan pada *Contingency Theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi Pemda yang bersangkutan.

### **Variabel Intervening Konflik Kognitif dan Konflik Afektif**

Memaksimalkan konflik kognitif dan meminimalkan konflik afektif Tuckman (1988) menyatakan bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antar yang terletak diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. *Konflik kognitif* dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mendorong ke arah perbaikan pengambilan keputusan. Manfaat yang diperoleh dari konflik kognitif berasal dari potensinya untuk menyediakan kesempatan untuk interaksi dengan *dialectical style*, berdebat, mempertahankan argument yang memiliki melawan argument lain dalam organisasi (Mitroff dan Emshoff, 1979, Janis, 1982; Swheiger dan Sandlerg, 1989 dalam henhall, 2004).

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

*Konflik afektif* cenderung melibatkan persepsi yang mengancam posisi seseorang di dalam suatu kelompok, pertikaian, frustrasi dan firksi antara pribadi seseorang dengan nilai norma yang ada (Petersen, 1983; Ross, 1989 dan Amason, 1996 dalam Chenhall, 2004). Beberapa kasus yang terdapat dalam penelitian Chenhall (2004) mengenai implementasi Activity Based Costing Manajemen, konflik afektif ini berpotensi dapat mengurangi kegunaan ABCM untuk perencanaan produk dan manajemen biaya.

Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan ilmiah dari psikologi yang mempelajari kondisi, yaitu proses-proses mental yang mendasari perilaku . Psikologi kognitif mempunyai riset dominan yang luas termasuk bekerja dengan memori, atensi, persepsi dan representasi pengetahuan, memberi alasan, kreativitas dan pemecahan masalah (Hartono, 2007). Beberapa penelitian telah menekankan bahwa pentingnya cognitive sebagai variabel penting yang mempengaruhi sikap dan penerimaan pengguna dalam manajemen sistem informasi (Benbansat dan Taylor, 1978; Lucas 1981; Matson dan Metroff, 1973; Robey, 1983; Sage, 1981; Zmut, 1975, cognitive berkenaan dengan proses karakteristik individu dalam analisis, evaluasi dan interpretasi dari data yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sebagai dasar yang mana mereka mengklasifikasikan sebagai sistematis-heuristics (Bariff dan Lucks, 1997), *analytic-heuristics* (Driver dan mock, 1975; Vasarhelyie, 1977) atau *sensing-thinking* dan *intuition felling* (Benbansat dan Taylor, 1978; Henderson dan Nutt, 1980; Matson dan Mitroff, 1973), dikutif



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

dalam McElroy, 2007. *Self efficacy* didefinisikan sebagai kepercayaan atau keyakinan seseorang, menyangkut kemampuan dia dalam melakukan aktivitas atau tindakan (Bandura 1986). Adapun seseorang yang memiliki *self efficacy* yang rendah akan mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan (Bandura 1986). Teori kognitif sosial mengharapkan *self efficacy* individu mempunyai pengaruh langsung pada tugas mereka dan persistensi dalam pencapaian tugas. *Self efficacy* adalah suatu ukuran kepercayaan dalam kemampuan menggunakan suatu teknologi.

#### **Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .**

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output* –nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan Keuangan, sesuai dengan siklus

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP. Dengan catatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tidak mengatur perubahan atas pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan (Hendriksen 2005). Tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga menyulitkan pemeriksaan (Jones dan Pandlebury 2000). Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan (Hendriksen 2005). Dalam Penelitian Abdul Rahman (2009), Hasilnya terbukti bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdapat kinerja penda terbukti, implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan manfaat dan kemudahan bagi penda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jones dan Pandlebury (2000) dan Hendriksen et al. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan salah satu peraturan operasional dalam implementasi otonomi Daerah, setelah era reformasi tata kelola keuangan Negara/ daerah yang ditandai dengan disahkannya paket undang-undang bidang keuangan Negara. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yaitu pasal 54,

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
www.sna13purwokerto.com

---

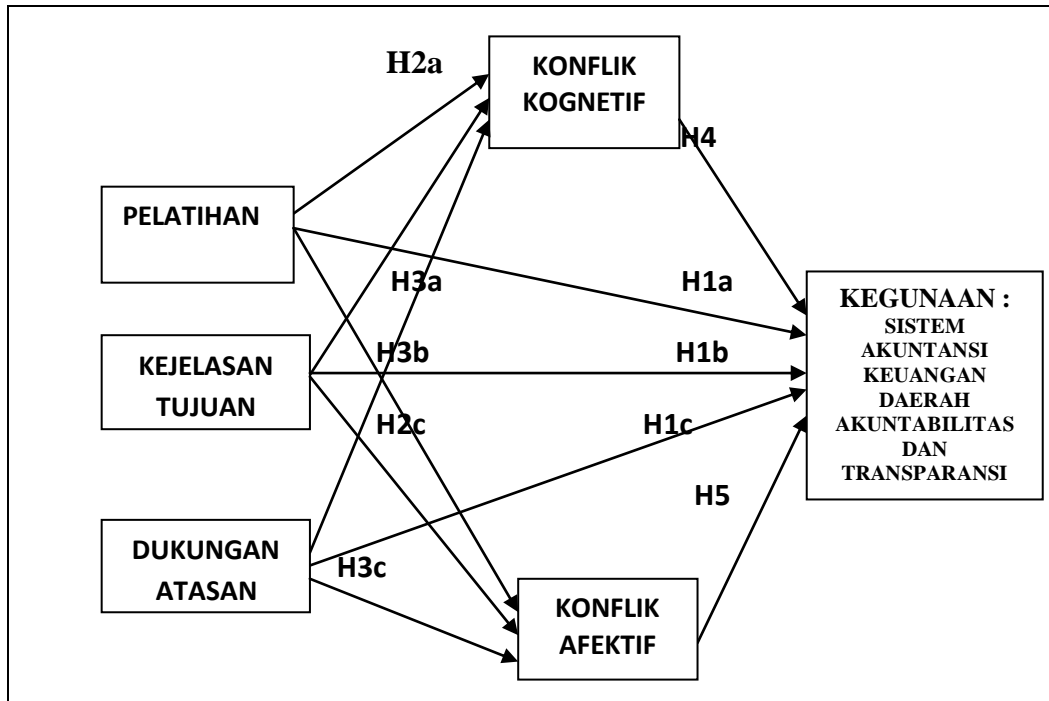
“ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negri”. Lahirlah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, senagai pengganti Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*, serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 ini merupakan pedoman umum bagi pemerintah daerah di dalam melaksanakan tata kelola keuangannya. Daerah harus menyusun aturan pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah, dalam bentuk Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai Peraturan Kepala Daerah terkait dengan implementasinya. Ada beberapa hal mendasar yang berubah dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002 ke Permendagri Nomor .13 Tahun 2006 yakni: Dari Sentralisasi ke Desentralisasi.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Model faktor berperilaku organisasi (pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan) dengan *variabel intervening* kognitif dan afektif konflik akan meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang transparansi dan akuntabilitas dapat digambarkan berikut:

Gambar 2.2.1

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP  
KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
DI SUBOSUKAWONOSRATEN**



### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model (SEM)*. Penelitian ini akan mengukur pengaruh faktor organisasional meliputi: pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan melalui *variabel Intervening* konflik kognitif dan afektif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengaruh langsung antara faktor organisasional yang meliputi

pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi keuangan daerah. Teknik analisis ini menggunakan program *Analisis Of Moment Structure* (AMOS 16.0)

### **3.2. Devinisi Operasional**

Variabel Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Faktor organisasional terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan menggunakan 9 item instrument yang dibangun oleh Shield dan Young (1989) dan Shield (1995) yang dimodifikasi. Skor dari item dari 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai. Variabel faktor organisasi ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan, dan pelatihan. Konflik Kognitif dan Afektif Konflik merupakan kesenjangan antara ide individu dan lawannya. Konflik kognitif dan afektif diukur dengan menggunakan 6 item yang dikembangkan oleh Jehn (1994) dan digunakan oleh Jehn (1994) dan Amason (1996). Skala 1 = Sangat Tidak Sesuai hingga 5 = Sangat Sesuai. Menurut Swihweig dkk berpendapat bahwa konflik disatu pihak dapat meningkatkan kualitas keputusan, namun dilain pihak dapat menurunkan kemampuan individu untuk kerjasama.

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Adapun Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang



transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel

### **3.3. Analisa Data**

Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah Kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 511 kuesioner.

Uji Kualitas Data dan Uji realibilitas data. Uji kualitas data uji ralibilitas data dilakukan melihat nilai Cronbrach Alpha ( $\alpha$ ) dari variabel yang diteliti. Pengujian validitas Corelasi Product Moment dengan menggunakan Program SPSS 12,0. Uji Asumsi Model Asumsi-asumsi untuk terpenuhinya pada pengujian model analisis path atau analisis jalur adalah sebagai berikut: Ukuran sampel. Sampel minimum yang diharapkan dapat kembali minimal 100 eksemplar, sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan untuk analisis data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) Hair et al., (1998). Uji normalitas data. *Assesment of normality* merupakan *output* untuk menguji data normal secara *multivariate* Pendekatan *non parametric* dikenal dengan *resempling* (Hair et.al, 1998). Evaluasi Outlier. Mahalanobis distance untuk mengukur data outlier yaitu mendeteksi apakah sekor observasi ada yang jauh berbeda dengan skor centroid .Pengujian terhadap *multivariate outlier*

dievaluasi dengan Chi Square. Mahalanobis d-squared digunakan untuk mengukur jarak skor hasil observasi terhadap nilai centroidnya. Hasil pengolahan data dengan AMOS 16.0 . Evaluasi Multicollinearity atau Singularity. Evaluasi Multicollinearity atau Singularity dilakukan melihat determinan matrik kovarian. Pengujian data menggunakan AMOS 16.0

### **3.4. Hipotesis dan Pembahasan**

#### **Hipotesis**

Pengujian Hipotesis Hubungan Faktor Organisasional dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis penelitian (H1a) menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -1,667 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0167 hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif pelatihan dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis penelitian (H1b) menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -2,015 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0177. Hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah karena nilai CR menunjukkan nilai yang negatif. Hasil Analisis pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis penelitian (H1c) menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,289 berada di atas ambang batas nilai kritis 1,96 pada signifikansi 5% dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0061 Hasil uji statistik membuktikan adanya hubungan positif dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis pada Tabel 9.

Pengujian Hipotesis Hubungan Faktor Organisasional dengan Konflik. Hasil pengujian hipotesis 2a menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -3,353. dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Namun CR menunjukkan angka negatif yang berarti terdapat hubungan negatif antara training dengan konflik kognitif. Hasil Analisis pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis 2b menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -3,369 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Hasil pengujian hipotesis 2c menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,482 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,051. Hasil Analisis pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis 3a menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -3,297 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,059. Hasil uji statistik berhasil membuktikan adanya hubungan negatif antara pelatihan dengan konflik afektif. Hasil pengujian hipotesis 3b menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,362 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Hasil uji statistik berhasil membuktikan adanya hubungan negatif kejelasan tujuan dengan konflik afektif. Hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif pelatihan dengan kegunaan konflik kognitif. Hasil Analisis pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis 3c menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah -2,234 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0157. Hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan negatif dukungan atasan dengan konflik afektif. Hasil Analisis pada Tabel 9.

Pengujian Hipotesis Hubungan Konflik dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 2,167 dan

nilai probabilitas (p) adalah 0,0153. Hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif konflik kognitif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis pada Tabel 9. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa nilai *critical ratio* (CR) adalah 3,332 dan nilai probabilitas (p) adalah 0,0056. Dengan demikian hasil uji statistik tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif konflik afektif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Analisis pada Tabel 9.

Pengujian Hipotesis Hubungan Faktor Organisasional dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Dimediasi dengan Konflik Kognitif dan Afektif. Pengujian hipotesis 6 menunjukkan besaran efek tidak langsung (*indirect effect*) konflik kognitif sebagai variabel penyelang (*intervening*) di antara faktor organisasional dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Terdapat hubungan positif faktor organisasional terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, jika dimediasi oleh konflik kognitif. Pengujian hipotesis 7 menunjukkan besaran efek tidak langsung (*indirect effect*) konflik kognitif sebagai variabel penyelang (*intervening*) di antara faktor organisasional dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terdapat hubungan positif faktor organisasional terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, jika dimediasi oleh konflik kognitif.

### **Pembahasan Hipotesis**

Hasil pengujian hipotesis 1a (H1a) dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.. Hasil

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

yang berbeda ini disebabkan fenomena di lapangan, dimana pelatihan yang diadakan terkait dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih sedikit, selain itu latar belakang pendidikannya bukan dari jurusan akuntansi sehingga pencapaian hasil belum maksimal atau belum sesuai yang diharapkan, pelatihan yang diadakan masih belum melibatkan seluruh pegawai di bidang verifikasi dan anggaran serta disebabkan bergantinya regulasi atau undang-undang Baru, pelatihan yang sebelumnya belum trampil sudah disusul pelatihan yang baru ini sangat membingungkan para pengelola keuangan di SKPD.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ( 1b), dapat disimpulkan terdapat hubungan negatif antara kejelasan tujuan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil yang berbeda ini disebabkan karena fenomena yang terjadi, dimana ada suatu ketidak jelasan tujuan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan bergantinya regulasi atau Undang-Undang yang mengatur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis 1c (H1c).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H2a), kesimpulan bahwa pelatihan berhubungan negatif dengan konflik kognitif. Begitu juga dengan hasil pengujian hipotesis (H2b) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kejelasan tujuan dengan konflik kognitif. Hipotesis (H2c) tidak diterima yang berarti tidak ada hubungan antara dukungan atasan dengan konflik kognitif. Hasil pengujian hipotesis (H3a) memberikan kesimpulan bahwa pelatihan berhubungan negatif dengan konflik afektif. Hasil yang sama diperlihatkan pada hipotesis (H3b)

dimana kejelasan tujuan berhubungan negatif dengan konflik afektif. Namun, hipotesis (H3c) menyimpulkan bahwa hubungan negatif antara dukungan atasan dengan konflik afektif tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H4), konflik kognitif tidak berhubungan positif dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis (H5), menunjukkan bahwa konflik afektif berhubungan negatif dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditolak pada tingkat signifikansi 5% akan tetapi hipotesis tersebut dapat diterima pada tingkat signifikansi 10%.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini dari analisis data dan pengujian hipotesis, ditarik kesimpulan bahwa faktor organisasional yang diuji, Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berhasil dibuktikan.

Konflik kognitif tidak berhubungan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Konflik afektif berhubungan negatif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Chenhall (2004) dimana faktor konflik afektif berhubungan dengan kegunaan sistem *ABCM*. Hubungan tidak langsung antara faktor

organisasional dengan kegunaan sistem yang dimediasi dengan konflik kognitif ada perbedaan yang sangat kecil.

## **5.2. Saran**

Responden penelitian terbatas pada Pengelola Keuangan SKPD Penatausahaan masing-masing Dinas di SUBOSUKAWONOSRATEN, sehingga kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda, maka perlu untuk diperluas Propinsi lain di Indonesia supaya dapat digeneralisasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu (*cross sectional*), sehingga ada kemungkinan perilaku individu berubah dari waktu ke waktu. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, tidak terbatas pada faktor perilaku tapi juga faktor teknis dalam Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah perlu untuk diteliti. Perlu dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada Pengelola Keuangan SKPD Penatausahaan masing-masing Dinas saja namun diperluas untuk seluruh Pengelola Keuangan di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Propinsi atau seluruh Indonesia, serta dilakukan pengembangan instrumen, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chenhall (2004) yang berlatar belakang budaya barat. Perbedaan budaya tersebut menyebabkan perbedaan pandangan dalam melihat konflik. Budaya barat yang mengakui bahwa konflik kognitif merupakan konflik positif. Hal ini tidak berlaku dalam budaya timur dimana konflik baik kognitif maupun afektif ditekan karena menimbulkan perpecahan. Perbedaan budaya tersebut dapat menimbulkan bias



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

terhadap hasil penelitian. Hasil pengujian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya kemungkinan juga diakibatkan oleh perbedaan obyek yang diteliti dimana penelitian Chenhall (2004) dilakukan pada perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini dilakukan pada sistem di pemerintahan.

### **5.3. Implikasi**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah Daerah bahwa kesuksesan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana, namun faktor perilaku dari kegunaan atau pengguna juga perlu diperhatikan. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan pada Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas dimasa yang akan datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan faktor keperilakuan dalam kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Indonesia terutama yang berhubungan dengan perilaku dari pengguna.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.



# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

- Afiah, 2004, Pengaruh kompetensi anggota DPRD, kompetensi aparatur pemerintah daerah pelaksanaan sistem informasi akuntansi, penganggaran serta kualitas informasi keuangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik (survey pada kabupaten/ kota Jawa Barat). *Desertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung.*
- Ardi Hamzah, 2009, Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial sesuai Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi ( Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura), *Simposium Nasional Teknologi Informasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004, Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah Kaitannya Dengan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18–30.
- Azhar, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, *Thesis S2 Universitas Sumatra Utara.*
- Bandura, 1989, Social Cognitive Theory of Organizational Management, *Academy of Management Review*, Vol 14:361-384
- Chenhall, R.H (2004), The Role of Cognitive and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. *Behavioral Research in Accounting* 16:19
- Cohen, Sandra. February, 2007. Assessing It As A Key Success Factor for crucial Accounting Implementation In Greek Municipalities. *Journal of Financial Accountability & Management.*
- De Bruijn, Hans, 2002, Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope With The Risk of Performance Measurement, *The International Journal Of Public Sector Management*, Vol. 15. No.7 Hal. 578 – 594.
- Dinata & Anton Mulhar. 2004. Tinjauan Atas Kesiapan Sumber Daya Manusia pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya *Good Governance* di Era Otonomi Daerah, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

- Djamaluddin, Rahmawati 2009, Pengaruh Faktor Individu dan Teknologi Terhadap Penerimaan Pembelajaran Berdasarkan Teknologi Web pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Simposium Nasional Teknologi Informasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P.Hollingsworth.1994. *The Use and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government. International Journal of Public Sector Management*,Vol. 7 No. 3. Hal 4-15.
- Doyle J, W. Ge & Mc Vay. 2006. Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*.
- Dunkk, A dan H. Perera, 1997, The incidence of budgetary slack: A field study exploration, *Accounting Auditing and Accountability, Journal*, 10(5): 649-664.
- Efferin, Sujoko. 2008. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ellyana, Denovita. Achyar Redy & Ardi Hamzah. 2008. Variabel Anteseden & Kabupaten di Pulau Madura). *Accounting Conference, Doctoral Colloquium and Accounting Workshop*. Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura).*Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM*.
- Hartono, ( 2004), *Metodologi Penelitian Salah Kaprah dan pengalaman* , BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hendriksen, M.C. dan B.M.F. Van. 2005, *Accounting Theory*, Ed. New Jersey; Person Education, Inc.

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

- Heri Hidayat, 2008, Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way Kanan Dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Daerah Kabupate Way Kanan, *Thesis S2* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Imam Ghozali (2006), *Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS* , Badan Penerbit Universits Diponegoro , Semarang .
- Imam Ghozali (2007), *Model Persamaan Struktur Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Versi 16.0* Badan Penerbit Universits Diponegoro, Semarang .
- Imelda. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Indra Bastian 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriasari, Desi, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SNA XI*. Pontianak.
- Irvine Lapsley and June Pallott, 2000, Accounting Management and Organizational Change : A Comparative Study Of Local Government, *Management Accounting Reasearh*, 11, 213-229
- Jehn, 1994, Enthancing Effectivieness: An Investigation of Advantage and Disatventages of Value Based Intragroup Conflict, *International Jurnal Of Confict Management* 5 : 233 – 238
- Jumali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.Vol 5 No.2 Hal. 214-228.
- Karunia Sari Nur, Pangesti, 2008, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: Study Kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, *Thesis S2* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta .

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

Mahmudi ( 2007) , *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.

Mas'ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional: Konsep & plikasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mationo dan Pujiati, 2009, Pengaruh Computer Playfulness, Personal Innovativeness terhadap Cognitive Absorption dan Pengaruh Cognitive terhadap Usefulness dalam Penggunaan Teknologi Informasi, *Simposium Nasional Teknologi Informasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Mwita, Isaac John, 2000, Performance Manajemen Model, *The International Journal of Public Sector Manajement*, MCB University Press, Vol.13 No. 1, Hal 19-3

Rahmawati, Djamaluddin, 2008, Pengaruh Faktor Individu dan Teknologi Terhadap Penerimaan Pembelajaran Berdasarkan Teknologi Web pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Majalah Ekonomi*, Universitas Airlangga Surabaya..

Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia . Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia . Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia . Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia . Undang-undang RI. No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

Shields, M. D., and S. M. Young (1989), Behavioral Model for Implementing Cost Management System, *Journal of Cost Management (Winter)*, 17:25

Pamungkas, B, 2005, Pengaruh kualitas Peraturan Perundang-undangan, penerapan akuntansi keuangan sector public dan penerapan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (survey pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dipropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Desertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung*, Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wijanto dan Istiningsih, 2007, Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi, *Simposium Nasional Akuntansi*, Pontianak.

Yuhernita, I. 2003, *Principial – Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sector Publik*.

Yogiyanto HM, 2007, *Sistem Informasi Keperilakuan*, Andi , Yogyakarta

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

## **Tabel 1** **Data Kuesioner Yang Dikirim Ke Responden**

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH
1	Kota Surakarta	73 eksemplar
2	Kabupaten Boyolali	73 eksemplar
3	Kabupaten Sukoharjo	73 eksemplar
4	Kabupaten Wonogiri	73 eksemplar
5	Kabupaten Karanganyar	73 eksemplar
6	Kabupaten Sragen	73 eksemplar
7	Kabupaten Klaten	73 eksemplar
<b>Total</b>		<b>511 eksemplar</b>

**Tabel 2**  
**Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
Kuesioner yang didistribusikan	511 eksemplar	100 %
Kuesioner yang diterima (kembali)	(427) eksemplar	83,56 %
Kuesioner yang tidak kembali	84 eksemplar	16,44 %
Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya) sehingga tidak dapat diolah	20 eksemplar	3,91 %
Kuesioner yang lengkap Yang Diolah	407 eksemplar	79,65 %
Tingkat Pengembalian ( <i>Response Rate</i> )	$(427/511)*100\%$	83,56 %
Tingkat Pengembalian yang bisa digunakan ( <i>Usable Response Rate</i> )	$(407/511)*100\%$	79,65 %

**Tabel 3**  
**Jenis Kelamin Responden**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
----	---------------	--------	------------

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

1	Pria	239	58,72 %
2	Wanita	168	41,28 %
<b>Total</b>		<b>407</b>	<b>100 %</b>

**Tabel 4**

## Tingkat Pendidikan Responden

	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTA	72	17,69 %
2	D III	90	22,11 %
3	S1	187	45,95 %
4	S2	58	14,25 %
5	S3	-	-
<b>Total</b>		<b>407</b>	<b>100 %</b>

**Tabel. 5**

## Lama Bekerja Responden

NO	LAMA BEKERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	0 - 5 tahun	67	16,46 %
2	6 - 10 tahun	92	22,60 %
3	11 – 15 tahun	105	25,80 %
4	Diatas 15 tahun	143	35,14 %
<b>Total</b>		<b>407</b>	<b>100</b>

**Tabel .6**

## Statistik Deskriptif Variabel



# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

Variabel Penelitian	N	Mean	Std. Deviation
Dukungan Atasan	407	21.1450	2.86668
Kejelasan Tujuan	407	17.9607	2.58994
Pelatihan	407	15.3219	2.65729
Konflik Afektif	407	15.3440	2.56724
Konflik Kognitif	407	15.3440	2.56724
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	407	23.1646	3.92478

**Tabel . 7**  
**Hasil Uji Normalitas Data**  
**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	Min	Max	skew	c.r.	kurtosis	CR
TPL	1.000	23.00	.360	2.967	1.904	7.841
TKT	19.000	26.000	2.907	23.943	7.566	1.156
TDA	20.000	28.000	.720	5.929	.642	2.645
TAF	19.000	26.000	.756	6.226	.918	3.581
TKG	18.000	27.000	.483	.980	.302	2.580
TKS	27.000	43.000	2.395	19.724	5.770	23.759
Multivariate					16.094	16.569

**Tabel .8**  
**Konstruk dan Indikator-indikatornya**

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

Kode	Uraian
X1	Tugas-tugas yang diberikan telah disederhanakan sehingga setiap pegawai dapat mengerjakannya
X2	Atasan memberi wewenang kepada anda untuk melakukan pekerjaan menurut cara anda?
X3	Atasan mendukung pada keputusan yang anda buat dalam pekerjaan
X4	Berbagai pengetahuan dalam bidang manajerial dipunyai oleh atasan
X5	Cara-cara kerja spesifik telah dijelaskan
X6	Sudah ada cara-cara yang mudah untuk mengecek apakah suatu pekerjaan telah atau belum dilaksanakan
X7	Apakah berbagai bidang ketrampilan kerja dipunyai pimpinan
X8	Tujuan setiap pekerjaan yang anda kerjakan didefinisikan dengan jelas
X9	Tujuan organisasi diberikan dengan jelas oleh pimpinan
X10	Para pegawai patuh dan loyal kepada pimpinan
X11	Melaksanakan pekerjaan dengan kualitas bagus membuat saya merasa dapat mengembangkan kemampuan saya.
X12	Anda telah mengetahui bahwa pekerjaan anda berkaitan dengan tujuan kelompok/ organisasi.
X13	Pencapaian tujuan dari setiap tugas selalu ditekan pada lembaga anda

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---

- X14 Para pegawai dapat mengejakan dengan sistem yang baru tanpa ada rasa takut.
  - X15 Para pegawai selalu menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi
  - X16 Para pegawai merasa bebas dan tidak takut untuk tidak menyetujui pendapat dan tindakan atasan.
  - X17 Pimpinan menaruh kepercayaan kepada anda ?
  - X18 Pimpinan menyetujui pendapat dan inisiatif anda
- 
- X19 Pekerjaan pegawai memuaskan .
  - X20 Anda diberikan kebebasan untuk mendiskusikan berbagai masalah dengan atasan anda.
  - X21 Aatasan selalu memperhatikan problem yang anda hadapi
  - X22 Terdapat kesetia kawan pada kelompok kerja anda dan masing-masing saling member bantuan .
  - X23 Kontribusi anda kepada lembaga mendapat tanggapan yang menyenangkan .
  - X24 Berbagai masalah yang muncul telah diberikan pemecahannya dengan teliti.
  - X25 Semua dukungan dari atasan diterima semua oleh pegawai.
  - X26 Tingkat sasaran prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi sangat tinggi.
  - X27 Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pekerjaan telah diberikan cukup banyak jenis pelatihan.

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- 
- X28 Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat bagus .
- X29 Jenis Pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan pekerjaan.
- X30 Yang dikirim dalam pelatihan adalah mereka yang bekerja sesuai bidangnya .
- X31 Setiap ada penerapan sistem baru selalu diberikan pelatihan terlebih dahulu.
- X32 Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal selalu menggunakan bukti transaksi yang sah dilakukukan secara kronologis.
- X33 Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara periodic (berkala) ?
- T  
a  
b  
e  
l  
9
- X34 Laporan keuangan disusun oleh PPK- SKPD, Laporan berupa LRA, Neraca, CALK..
- X35 Paling lambat Laporan Realisasi Semester I diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari setelah semester pertama tahun anggaran terakhir.
- 
- X36 Laporan Keuangan mendorong SKPD untuk menggunakan Sumber Daya secara efisiensi dan efektif .
- X37<sup>H</sup><sub>A</sub> Prosedur antara keuangan yang ada tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta Prosedur yang disusun Pejabat berwenang daerah/ perda.
- X38<sup>L</sup><sub>A</sub> Laporan Keuangan yang baik mencerminkan tatakelola pemerintahan yang baik .
- X39<sup>N</sup><sub>A</sub> Pengguna Anggaran ( PA) bertanggungjawab atas pengguna anggaran melalui laporan keuangan yang disusun telah berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri no.59 tahun 2007 .
- X40<sup>S</sup><sub>I</sub> PPKD –SKPD dalam menyelenggarakan catatan akuntansi berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran..

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

## DAN INTERPRETASI PARAMETER ESTIMASI

	H	SE	CR	P	Keputusan 5 %	Keputusan10 %
TKG <--- TDA	H2a	0,456	-3,353	0,0056	Signifikan	Signifikan
TAF <--- TDA	H3a	0,311	3,297	0,0059	Signifikan	Signifikan
TKG <--- TKT	H2b	0,376	-3,369	0,0065	Signifikan	Signifikan
TAF <--- TKT	H3c	0,256	-2,234	0,0157	Tidak signifikan	Tidak signifikan
TKG <--- TPL	H2c	0,690	-3,482	0,0051	Signifikan	Signifikan
TAF <--- TPL	H3b	0,470	3,362	0,0056	Signifikan	Signifikan
TKS <--- TKG	H4	0,291	2,167	0,0153	Tidak signifikan	Tidak signifikan
TKS <--- TAF	H5	0,428	3,332	0,0056	Signifikan	Signifikan
TKS <--- TPL	H1a	0,133	-1,667	0,0167	Tidak signifikan	Tidak signifikan
TKS <--- TKT	H1b	0,203	-2,015	0,0177	Tidak Signifikant	Tidak signifikan
TKS <--- TDA	H1c	0,344	3,289	0,0061	Signifikan	Signifikan

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---